

PEMENUHAN HAK ATAS UPAH, JAM KERJA, DAN PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN KEKERASAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA

Jeanny Anggita Fitriyani

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) memainkan peran krusial dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan perekonomian, namun seringkali hak-hak mereka diabaikan. Dalam konteks jam kerja, upah, dan kekerasan, pemenuhan hak pekerja rumah tangga menjadi isu yang mendesak untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PRT, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perlindungan yang lebih baik. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan normatif disertai wawancara terhadap informan dari JALA PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang No. 13/2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015, formulasi pengaturan hukum terhadap PRT di Indonesia masih menghadapi kendala besar. Tidak adanya pengakuan sebagai pekerja formal menyebabkan hak-hak normatif PRT, seperti upah layak, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, sering terabaikan. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja dan belum disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyarankan pentingnya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk PRT, dengan mengacu pada standar hukum positif yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Dengan memahami kondisi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan perbaikan kesejahteraan PRT di Indonesia.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, RUU PPRT

ABSTRACT

Domestic workers (PRT) play a crucial role in supporting family welfare and the economy, yet their rights are often overlooked. In the context of working hours, wages, and violence, the fulfillment of domestic workers' rights has become an urgent issue to address. This study aims to analyze these issues, identify the challenges faced by domestic workers, and explore the necessary steps to achieve better protection. The research was conducted using a normative approach, along with interviews with informants from JALA PRT. The results indicate that despite existing labor regulations, such as Law No. 13/2003 and Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015, the legal framework for domestic workers in Indonesia still faces significant challenges. The lack of recognition as formal workers leads to the neglect of domestic workers' normative rights, such as fair wages, humane working hours, and protection from violence. Furthermore, the lack of supervision over the implementation of employment agreements and the failure to pass the Domestic Workers Protection Bill pose major obstacles. This study advocates for clearer regulations and stronger legal protection for domestic workers, in line with applicable national and international legal standards. By understanding these conditions, it is hoped that this research will contribute significantly to the protection of human rights and the improvement of domestic workers' welfare in Indonesia.

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, RUU PPRT.